

## Peran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang dalam mendorong Inklusi Sosial

Ambrosius Sindu Ardi Setiawan<sup>1\*</sup>; Anton Hermawan<sup>2</sup>; Tintien Koerniawati<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

\*Korespondensi: [742021002@student.uksw.edu](mailto:742021002@student.uksw.edu)

Naskah diterima: 05-08-2025, direvisi: 08-11-2025, disetujui: 10-11-2025

### ABSTRACT

The purpose of this study is to outline how the Semarang Regency Archives and Library Office promotes social inclusion through initiatives that broaden access, boost community involvement, and cultivate empowerment. Data was gathered using a descriptive qualitative method that included document analysis, observations, and interviews. According to the findings, the library has evolved from a conventional book collection to an active supporter of social inclusion initiatives including ICT, cooking, sewing, and culturally-based activities. Although there are still restrictions on comfort, accessibility for people with disabilities, and resource sustainability, the facilities that are provided support a variety of activities. Roles as teachers, participants in the program, and proposers of future activities all demonstrate community involvement. Participation obstacles were also noted, including differences in availability and age and gender. Increased skills, economic independence, social solidarity, and community involvement in literacy and cultural development are just a few of the observable effects of the inclusion initiatives. In summary, the Semarang Regency Archives and Library Office is an important social change agent that empowers communities, promotes active participation, and facilitates access. However, more policy support, program diversity, and infrastructure improvements are still required.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang dalam meningkatkan inklusi sosial melalui program yang meningkatkan akses, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong pemberdayaan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif, yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan meninjau dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan telah berubah dari sekadar tempat untuk menyimpan buku menjadi tempat yang aktif membantu program inklusi sosial. Perpustakaan membantu orang belajar memasak, menjahit, menggunakan teknologi informasi, dan mengambil bagian dalam kegiatan yang berbasis budaya lokal. Meskipun fasilitasnya mendukung berbagai aktivitas, masih ada keterbatasan terkait kenyamanan, akses difabel, dan keberlanjutan sarana. Keterlibatan sebagai peserta, instruktur, atau pemberi usulan kegiatan menunjukkan partisipasi masyarakat. Selain itu, keterbatasan partisipasi seperti kesenjangan usia, gender, dan waktu dikaji. Terbukti bahwa program inklusi sosial meningkatkan keterampilan, kemandirian ekonomi, solidaritas sosial, dan keterlibatan komunitas dalam literasi dan budaya. Singkatnya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang memainkan peran penting sebagai agen perubahan sosial dengan memfasilitasi akses, partisipasi aktif, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, perpustakaan masih membutuhkan peningkatan fasilitas fisik, keberagaman program, dan dukungan kebijakan yang lebih kuat.

**Keywords:** Perpustakaan Umum; Social inclusion; Facilitation; Empowerment; Participation.

### 1. PENDAHULUAN

Inklusi sosial dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan usaha yang bertujuan untuk melibatkan serta memberdayakan seluruh individu dalam masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya penerimaan terhadap perbedaan latar belakang sosial ekonomi, budaya, agama, gender, disabilitas, maupun ras. Tujuan utama dari inklusi sosial adalah menciptakan kesempatan yang setara bagi semua orang untuk berkembang dan berkontribusi. Dengan demikian, inklusi

sosial juga memastikan setiap individu memiliki akses penuh terhadap sumber daya, hak, dan peluang untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Melalui prinsip-prinsip inklusi sosial, tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat yang adil, setara, dan sejahtera. Dengan mendukung partisipasi dan kontribusi dari seluruh spektrum masyarakat, inklusi sosial bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, dan ketidakadilan, menciptakan lingkungan di mana setiap individu diakui, dihargai, dan dapat berkembang secara optimal. Sebagai landasan untuk pembangunan sosial yang berkelanjutan, inklusi sosial mencerminkan komitmen terhadap keberagaman sebagai kekayaan, bukan sebagai hambatan, serta menggambarkan visi masyarakat yang berlandaskan persamaan dan keadilan bagi semua<sup>2</sup>.

Selain sebagai gudang informasi, perpustakaan juga berfungsi sebagai ruang belajar dan interaksi. Dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti diskusi literatur, lokakarya seni, dan pertemuan komunitas, perpustakaan menciptakan lingkungan yang mempromosikan pertukaran ide dan pengalaman antara individu dari latar belakang yang berbeda. Ini bukan hanya sekadar memperluas pengetahuan, tetapi juga menghancurkan tembok pemisah sosial dan menciptakan pemahaman yang lebih dalam antaranggota masyarakat. Perpustakaan menjadi tempat di mana keberagaman dihargai, dan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan ini menciptakan jaringan sosial yang kuat, membantu mengurangi kesenjangan sosial, dan merangsang kolaborasi positif di dalam masyarakat<sup>3</sup>.

Selain itu, perpustakaan memiliki potensi sebagai agen perubahan sosial yang dapat mendorong pemberdayaan masyarakat. Dengan menyelenggarakan program-program seperti pelatihan keterampilan, beasiswa pendidikan, dan layanan informasi yang terfokus pada kebutuhan masyarakat, perpustakaan dapat membantu mengangkat taraf hidup individu dan kelompok yang mungkin berada dalam situasi kurang mendukung. Melalui upaya ini, perpustakaan bukan hanya sekadar tempat penyimpanan informasi, tetapi juga menjadi motor penggerak kemajuan sosial, membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berdaya, dan adil. Dengan mengintegrasikan peran ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang dapat menjadi katalisator positif bagi perubahan sosial yang berkelanjutan dan inklusif<sup>4</sup>.

Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan serius dalam mencapai inklusi sosial yang berkelanjutan. Salah satu permasalahan krusial adalah kemiskinan, yang masih menjadi tantangan utama di berbagai wilayah. Permasalahan inklusi sosial ini bukan hanya menjadi masalah moral, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi dapat menciptakan ketidakseimbangan struktural yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Oleh karena itu, penanggulangan permasalahan inklusi sosial menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak dan peluang secara setara tanpa terkecuali<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Sitti Faoziyah, "Inklusi Sosial Dalam Perspektif Keislaman: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Untuk Semua," *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 5, no. 1 (2023): 47–56, <https://doi.org/10.54783/jin.v5i1.677>.

<sup>2</sup> RR. Iridayanti Kurniasih and Rahmat Setiawan Saefullah, "Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan Di Perpustakaan Daerah Karanganyar," *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan* 7, no. 2 (2021): 149–60, <https://doi.org/10.14710/lenpust.v7i2.34599>.

<sup>3</sup> Kurniasih and Saefullah.

<sup>4</sup> Affa Izthana and Mecca Arfa, "Peran Pustakawan MTs N 1 Jepara Dalam Upaya Mengembangkan Minat Kunjungan Siswa Pada Perpustakaan," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 9, no. 1 (2020): 93–103, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/29974>.

<sup>5</sup> Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro, "Peta Jalan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia," *Kementerian PPN/Bappenas*, 2021, 35, [https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap\\_Bahasa-Indonesia\\_File-Upload.pdf](https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf).

Perpustakaan memegang peran sentral dalam pembentukan masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya pengetahuan dan peluang untuk mengembangkan potensi diri. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai gudang buku, tetapi juga sebagai pusat informasi, pembelajaran, dan pertemuan sosial. Dalam konteks inklusi sosial, perpustakaan umum berperan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan layanan yang menjangkau seluruh lapisan, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, dan komunitas terpencil. Beberapa perpustakaan di Indonesia telah menerapkan konsep inklusi sosial, antara lain Perpustakaan Umum Kota Surabaya yang mengembangkan program pelatihan keterampilan digital dan kewirausahaan bagi masyarakat sekitar, serta Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang menjalankan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan perpustakaan sebagai ruang belajar dan inovasi. Dalam konteks tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang menjadi objek kajian yang relevan mengingat perannya yang strategis dalam memperkuat inklusi sosial di tingkat daerah<sup>6</sup>.

Terkait perkembangan masyarakat, di Kabupaten Semarang yang beraneka ragam menyajikan tantangan unik bagi perpustakaan dalam menciptakan inklusi sosial. Dalam masyarakat yang heterogen, perpustakaan harus mampu menciptakan ruang yang ramah dan inklusif bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, etnis, atau agama. Studi kasus ini akan menggali bagaimana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang berhasil menanggapi dan mengatasi dinamika sosial ini, membangun jembatan antar kelompok masyarakat, dan merangsang pertukaran ide dan budaya.

Dengan melihat latar belakang sejarah, kondisi sosial ekonomi, dan perkembangan masyarakat di Kabupaten Semarang, kita dapat memahami konteks yang melingkupi peran perpustakaan dalam mendorong inklusi sosial. Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam membentuk pemikiran dan perilaku masyarakat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang menjadi subjek kajian yang menarik dalam memahami bagaimana inklusi sosial dapat diwujudkan melalui akses, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan.

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang memfasilitasi masyarakat dalam program inklusi sosial, bagaimana partisipasi masyarakat dalam program inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang, serta, bagaimana dampak inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang terhadap pemberdayaan masyarakat di komunitas Kabupaten Semarang.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menilai peran konkret perpustakaan dalam mendukung agenda pembangunan inklusif di tingkat lokal, terutama di tengah tantangan kesenjangan sosial dan keterbatasan fasilitas. Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis melalui pengembangan kerangka analisis yang mengintegrasikan empat aspek utama fasilitasi program perpustakaan, inklusi sosial, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat yang belum banyak dikaji secara holistik dalam literatur sebelumnya.

Dari sisi empiris, penelitian ini menghadirkan bukti kontekstual dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang sebagai model implementasi inklusi sosial berbasis lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menempatkan perpustakaan sebagai agen perubahan sosial melalui strategi inklusi yang adaptif dan partisipatif.

---

<sup>6</sup> Sitaresmi Suryani Retno, Yuli Rohmiyati, and Jazimatul Husna, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perpustakaan: Studi Kasus Di Rumah Pintar 'Sasana Ngudi Kawruh' Kelurahan Bandarharjo-Semarang," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 4, no. 2 (2015): 157–66, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/9518/0>.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Inklusi Sosial

Dalam perpustakaan, fasilitasi diwujudkan melalui program-program seperti lokakarya, pelatihan literasi digital, atau forum komunitas yang dirancang untuk mengundang partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat (Robert James, 2018). Menurut Den Houting et al. (2022), inklusi sosial adalah suatu proses dan usaha untuk melibatkan serta memberdayakan semua individu, tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial ekonomi, budaya, agama, gender, disabilitas, atau ras. Dalam konteks inklusi sosial, tujuannya bukan hanya menciptakan kesetaraan akses, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memiliki hak, peluang, dan dukungan yang setara untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Inklusi sosial bertujuan untuk membentuk masyarakat yang adil, setara, dan sejahtera, di mana semua anggotanya diakui, dihargai, dan dapat berkontribusi sesuai dengan potensi masing-masing. Dengan mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan diskriminasi, inklusi sosial menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman dan penerimaan<sup>7</sup>.

Inklusi sosial sebagai suatu konsep yang mencakup kehadiran, partisipasi, dan keterlibatan setiap individu dalam semua lapisan masyarakat. Inklusi sosial melibatkan penciptaan lingkungan yang mempromosikan penerimaan tanpa diskriminasi, serta memberikan akses yang setara terhadap sumber daya, peluang, dan hak bagi semua warganegara<sup>8</sup>. Manfaat inklusi sosial sangat luas dan mencakup banyak aspek kehidupan masyarakat. Pertama, secara ekonomis, inklusi sosial dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan seluruh potensi manusia dalam kegiatan ekonomi. Individu yang merasa diakui dan diintegrasikan dalam masyarakat cenderung lebih termotivasi untuk berkontribusi secara positif<sup>9</sup>.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan berbasis inklusi sosial berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Purwantini et al. (2021) menekankan bahwa optimalisasi peran perpustakaan desa dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang mendorong digitalisasi serta penguatan kapasitas masyarakat lokal. Haryanti (2019) menambahkan bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan wujud nyata dari perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi, tetapi juga sebagai pusat sosial budaya yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian oleh Swandari dan Jemani (2023) menunjukkan bahwa perpustakaan berbasis inklusi sosial juga dapat menjadi wadah pengembangan soft skills peserta didik, seperti kemampuan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan kepemimpinan, melalui berbagai kegiatan partisipatif. Sementara itu, Sayoga dan Syarif (2022) menemukan bahwa keberadaan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat hubungan sosial, serta mendorong munculnya kegiatan produktif di tingkat lokal. Sejalan dengan itu, Torano (2021) menegaskan bahwa program transformasi perpustakaan

<sup>7</sup> Reza Mahdi, "Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial: Apa Dan Bagaimana Penerapannya? (Sebuah Kajian Literatur)," *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 15, no. 2 (2020): 201, <https://doi.org/10.14421/fhrs.2020.152.201-215>; Jacqueline den Houting et al., "From Ivory Tower to Inclusion: Stakeholders' Experiences of Community Engagement in Australian Autism Research," *Frontiers in Psychology* 13, no. August (2022): 1–16, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.876990>.

<sup>8</sup> Neneng Komariah, Encang Saepudin, and Evi Nursanti Rukmana, "Pelayanan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Di Perpustakaan Desa Jendela Dunia Kabupaten Kuningan Jawa Barat," *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 17, no. 1 (2021): 112–27, <https://doi.org/10.22146/bip.v17i1.1298>.

<sup>9</sup> Aftina Nurul Husna et al., "Program Literasi Digital Untuk Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Desa Sedayu, Muntilan, Magelang," *Community Empowerment* 6, no. 2 (2021): 156–66, <https://doi.org/10.31603/ce.4259>.

berbasis inklusi sosial telah mengubah fungsi perpustakaan dari sekadar tempat membaca menjadi ruang terbuka yang mendukung pengembangan literasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

## Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif dari individu, kelompok, atau komunitas dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, atau aktivitas lainnya yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini mencakup berbagai bentuk partisipasi, mulai dari memberikan masukan dalam perencanaan proyek hingga berpartisipasi secara aktif dalam implementasi program<sup>10</sup>.

Pentingnya partisipasi masyarakat terletak pada memastikan bahwa kebijakan, program, dan proyek yang dilaksanakan memperhitungkan kebutuhan, keinginan, dan aspirasi masyarakat yang terlibat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan dapat meningkatkan legitimasi, akseptabilitas, dan efektivitas dari kebijakan atau program yang diterapkan. Partisipasi masyarakat dapat terjadi dalam berbagai tingkat, mulai dari partisipasi yang lebih pasif seperti memberikan masukan dalam survei atau konsultasi publik, hingga partisipasi yang lebih aktif seperti bergabung dalam kelompok advokasi, mengorganisir acara, atau bahkan berkontribusi secara langsung dalam pelaksanaan proyek. Pentingnya partisipasi ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan proyek memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang menerima semua tanpa diskriminasi. Dengan demikian, inklusi sosial dan partisipasi masyarakat bersama-sama memastikan keterlibatan setiap individu dalam semua aspek kehidupan sosial.

## Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi, mengartikulasikan, dan mengatasi masalah mereka sendiri<sup>11</sup>. Konsep ini melibatkan pemberian pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada individu dan kelompok dalam masyarakat sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat bukanlah hanya tentang memberikan sumber daya fisik atau finansial, tetapi juga melibatkan pengembangan kapasitas mental, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks ini, masyarakat dianggap sebagai subjek yang mampu mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri, mengembangkan solusi, dan mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan mereka<sup>12</sup>.

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mengelola, mengontrol, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan memberikan warga masyarakat alat, pengetahuan, dan dukungan yang diperlukan,

---

<sup>10</sup> den Houting et al., “From Ivory Tower to Inclusion: Stakeholders’ Experiences of Community Engagement in Australian Autism Research.”

<sup>11</sup> Rani Auliawati Rachman, Dadang Sugiana, and H Rohanda, “Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Untuk Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Untuk Masyarakat Sejahtera ( Studi Pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang ),” *Seminar Nasional MACOM III Universitas Padjadjaran 2019 “Communication and Information Beyond Boundaries” Strategi*, no. Februari (2019): 907–18, Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Masyarakat Sejahtera ( Studi Pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang ).

<sup>12</sup> Woro Titi Haryanti, “Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial,” *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) 2*, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i2.728>.

pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana individu dan kelompok dapat mengambil peran aktif dalam pembangunan dan perubahan sosial. Berikut adalah tujuan dan manfaat pemberdayaan masyarakat dalam konteks yang lebih mendalam<sup>13</sup>.

### 3. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada wawancara sebagai alat utama pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 19-21 Maret 2025 di dinas Kearsipan dan Perpustakaan kabupaten Semarang. Subjek penelitian mencakup dua kelompok informan, yaitu staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang serta masyarakat yang menjadi peserta program inklusi sosial. Informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, atau partisipasi kegiatan inklusi sosial di perpustakaan. Total terdapat delapan informan, yang terdiri dari tiga staf perpustakaan sebagai informan 1 (satu), informan 2 (dua), dan informan 3 (tiga) dipilih karena mereka berperan aktif dalam pengelolaan dan pelaksanaan program inklusi sosial. Sedangkan lima informan dari masyarakat, terdiri dari informan 4 (empat), infoman 5 (lima), informan 6 (enam), informan 7 (tujuh), dan informan 8 (delapan) dipilih karena mereka merupakan peserta aktif dalam kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh perpustakaan. Pemilihan informan tersebut dilakukan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai implementasi program inklusi sosial dari sisi penyelenggara maupun peserta. Teknik observasi partisipatif juga diterapkan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang interaksi dan dinamika di dalam perpustakaan. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara yang dirancang untuk mengeksplorasi peran perpustakaan dalam mendorong inklusi sosial, strategi yang diimplementasikan, dan dampaknya pada pengunjung. Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis tematik Miles & Huberman. Model analisis data Miles dan Huberman merupakan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh A. Michael Huberman dan Johnny S. Miles. Model ini terdiri dari tiga tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah agar fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menampilkan hasil reduksi dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, bagan, atau narasi, sehingga memudahkan peneliti dalam melihat pola dan hubungan antar data. Selanjutnya, tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan makna dari data yang telah disajikan dan memverifikasi temuan tersebut untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>14</sup>

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Tahapan Proses Fasilitasi Kegiatan Inklusi Sosial

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang telah mengalami transformasi signifikan dari peran tradisionalnya sebagai penyedia koleksi buku menjadi entitas yang lebih dinamis, yaitu sebagai fasilitator aktif dan sumber informasi utama dalam program inklusi sosial. Perubahan ini menunjukkan sebuah adaptasi strategis, di mana perpustakaan tidak lagi hanya

<sup>13</sup> Muhamad Bisri Mustofa et al., “Pemanfaatan Media Pustaka Digital Dalam Membangun Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Di Masa Pandemi,” *Jurnal Informasi, Perpustakaan, Dan Kearsipan (JIPKA)* 1, no. 1 (2021): 1–13.

<sup>14</sup> A. Michael Miles, Matthew B.; Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994).

menunggu pengunjung datang, melainkan secara proaktif menjangkau masyarakat untuk memberikan ilmu dan informasi yang dapat langsung diperlakukan. Pendekatan “jemput bola” ini ditegaskan oleh salah satu narasumber yang menyatakan bahwa “*kami sebagai pihak perpustakaan itu bukan hanya menunggu buku, tetapi juga harus memberikan ilmu dan informasi bagi masyarakat. Sebagai contoh, buku tutorial memasak tidak hanya disediakan, tetapi juga dijadikan dasar kegiatan memasak, bertani, dan menjahit. Kalau perpustakaan hanya sekadar menyediakan buku, tentu kami akan ditinggalkan. Jadi istilahnya perpustakaan harus jemput bola, jangan hanya menunggu saja*” (Informan 2, 2025) Selain itu, narasumber lain menambahkan bahwa perpustakaan juga berperan aktif dalam memfasilitasi kegiatan tersebut dengan menyediakan anggaran, tempat, dan narasumber pelatihan, seperti yang diungkapkan: “*perpustakaan memfasilitasi anggaran untuk narasumber dan menyediakan tempat serta publikasi kegiatan inklusi sosial seperti pelatihan memasak, membuat hantaran, kerajinan, dan melukis*” (Informan 1, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa transformasi peran perpustakaan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga diimplementasikan melalui kegiatan nyata yang berbasis pada kebutuhan praktis masyarakat.

Proses fasilitasi program inklusi sosial yang dijalankan oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Semarang mengikuti alur yang terencana dan bertahap, layaknya sebuah pengelolaan kegiatan profesional. Tahap awal adalah perencanaan dan inisiasi program, dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan minat masyarakat melalui analisis relevansi tema dan materi pelatihan, seperti yang terlihat dari penentuan kegiatan memasak, kerajinan, menggambar, melukis, hingga proyeksi kursus Bahasa Inggris di tahun 2025. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, termasuk kebutuhan akan honorarium pengajar eksternal dan analisis keterbatasan sarana prasarana seperti jumlah komputer untuk pelatihan TIK. Tahap kedua adalah Pengembangan dan Pengalokasian Sumber Daya. Setelah program diinisiasi, perpustakaan memfasilitasi alokasi anggaran untuk honorarium pengajar yang memiliki keahlian spesifik, serta memastikan ketersediaan tempat yang memadai untuk pelatihan. Meskipun demikian, pada tahap ini seringkali ditemukan hambatan terkait keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, seperti belum terpenuhinya target 10 unit komputer untuk pelatihan dasar. Tahap ketiga mencakup Persiapan Teknis dan Strategi Komunikasi. Persiapan teknis dilakukan dengan cermat meliputi penataan ruangan, penyediaan perlengkapan seperti karpet atau tikar, pengaturan akses listrik, penyiapan sistem suara, hingga kelengkapan dokumentasi seperti daftar hadir peserta. Secara paralel, strategi komunikasi dan promosi juga digencarkan melalui berbagai media seperti grup WhatsApp dan Instagram, meskipun diakui ada tantangan dalam menjangkau seluruh segmen masyarakat, terutama mereka yang kurang familiar dengan teknologi digital. Tahap keempat adalah Pelaksanaan Program. Pada tahap ini, berbagai kegiatan inklusi sosial dilaksanakan secara aktif, di mana peserta mendapatkan pelatihan langsung dari pengajar eksternal. Perpustakaan memastikan fungsionalitas fasilitas dan kenyamanan peserta selama proses belajar mengajar berlangsung. Terakhir, Tahap kelima adalah Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan. Meskipun tidak selalu diuraikan sebagai tahapan formal per kegiatan, terdapat proses evaluasi terhadap efektivitas program dan identifikasi hambatan, seperti keterbatasan TIK dan tantangan komunikasi.

Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi upaya perbaikan fasilitas, pemeliharaan rutin, serta pengembangan program di masa mendatang, menunjukkan komitmen perpustakaan untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas layanan inklusi sosialnya.

Perpustakaan secara efektif menjalankan peran ganda sebagai fasilitator dan sumber informasi dalam program inklusi sosial. Sebagai fasilitator, perpustakaan memberdayakan peserta dengan pengetahuan yang terkandung dalam koleksi buku-buku keterampilan, resep masakan, dan buku mewarnai. Untuk mempercepat pemahaman dan implementasi, perpustakaan secara aktif menghadirkan narasumber atau praktisi eksternal yang memberikan pelatihan langsung. Hal ini

sejalan dengan pernyataan salah satu narasumber yang mengungkapkan bahwa “*kami sebagai fasilitator memfasilitasi masyarakat dengan ilmu yang ada di perpustakaan, karena kita punya buku tentang keterampilan, resep masakan, dan mewarnai. Setelah membaca buku itu masyarakat bisa mempraktikkannya, tapi karena sulit jika hanya belajar dari buku, kami mencari narasumber untuk memberikan praktik atau tutorial agar mereka bisa lebih cepat terealisasi*” (Informan 1, 2025). Pendekatan ini terbukti efektif membantu peserta mempraktikkan ilmu yang diperoleh, bahkan beberapa di antaranya berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui usaha mandiri.

Dalam upaya memperkaya program dan menjaga relevansinya dengan konteks lokal, perpustakaan juga aktif melibatkan komunitas budaya dalam berbagai kegiatan. Keterlibatan ini, meskipun sering bersifat informal, sangat penting dalam menghadirkan kekayaan budaya Kabupaten Semarang ke dalam aktivitas perpustakaan. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu narasumber, “*kami libatkan komunitas budaya, misalnya untuk kegiatan pranotocoro kami bekerja sama dengan komunitas Permadani Kabupaten Semarang, dan pernah juga berkolaborasi dengan komunitas Dewa Siwa dalam pameran serta sanggar tari di Ungaran*” (Informan 1, 2025)

Kegiatan tersebut mencerminkan komitmen perpustakaan untuk menjadi pusat pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan berakar kuat pada budaya lokal.

### **Penyediaan Fasilitas Penunjang Program Inklusi Sosial.**

Perpustakaan menyediakan fasilitas dasar yang esensial untuk menunjang program inklusi sosial, meliputi ruangan khusus buku braile yang dilengkapi dengan pendingin ruangan, ruangan kegiatan berukuran 4x4 meter yang biasa digunakan untuk kegiatan memasak dan keterampilan, jaringan internet, toilet dengan air yang memadai, meja, kursi, dan akses listrik yang memadai. Secara umum, peserta program mengkonfirmasi bahwa fasilitas yang disediakan sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Namun, terdapat catatan bahwa untuk kegiatan yang membutuhkan peralatan khusus seperti oven dan peralatan memasak, terkadang oven listrik dan peralatan memasak harus dibawa sendiri oleh pengajar, mengindikasikan bahwa tidak semua peralatan spesifik disediakan secara mandiri oleh perpustakaan.

Dari segi fungsionalitas, fasilitas dinilai berdasarkan kesesuaian dan kenyamanan pengguna, meskipun terdapat kendala desain gedung yang kurang ramah disabilitas di Ungaran dibandingkan Ambarawa. Kenyamanan pengguna menjadi perhatian, dengan upaya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, khususnya di ruang anak dengan penggunaan warna ceria dan dekorasi. Dari perspektif peserta, fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan secara umum dinilai "sudah nyaman" atau "cukup nyaman". Namun, kenyamanan ini bersifat kondisional dan sangat bergantung pada jumlah peserta yang hadir. Beberapa peserta mengeluhkan bahwa jika jumlah peserta banyak, ruangan menjadi "agak berdesakan" atau "terasa penuh". Aspek keamanan diimplementasikan melalui penyediaan jalur evakuasi dan APAR di setiap ruang layanan, terutama untuk kegiatan berisiko seperti memasak, meskipun ketersediaan tangga darurat khusus masih belum memadai di Ungaran.

Terkait ketahanan fasilitas, perawatan dan pemeliharaan rutin dilakukan untuk memastikan kondisi sarana dan prasarana tetap baik serta fungsional dalam jangka panjang. Kegiatan ini mencakup pengecekan berkala terhadap peralatan, furnitur, serta sistem pendukung seperti pencahayaan dan listrik agar tetap berfungsi optimal. Selain itu, perawatan fasilitas di perpustakaan juga dilakukan dengan menjaga kebersihan ruang, mengatur sirkulasi udara, dan mengontrol tingkat kelembaban melalui penggunaan pendingin ruangan (AC). Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan mendukung aktivitas belajar maupun layanan informasi bagi pengguna perpustakaan.

Fleksibilitas tercermin pada penyediaan ruangan yang dapat dimodifikasi untuk beragam kegiatan, meskipun kebutuhan akan 10 unit komputer untuk pelatihan dasar masih terkendala

anggaran dan sarana prasarana yang belum memadai. Sementara itu, informasi eksplisit mengenai keberlanjutan material dan desain (keawetan) tidak secara detail disebutkan dalam data yang tersedia, namun secara implisit berkaitan dengan upaya perawatan fasilitas agar dapat digunakan dalam jangka panjang.

Terakhir, estetika ruang kegiatan ditingkatkan melalui elemen desain khusus seperti cat dan karpet berwarna-warni serta gambar menarik di ruang anak, menciptakan suasana yang mendukung kreativitas peserta. Di area ini, perpustakaan menerapkan cat dinding berwarna-warni, karpet dengan motif ceria, dan gambar-gambar menarik yang dirancang khusus untuk menarik minat anak-anak. Salah satu narasumber juga menambahkan tulisan-tulisan di dinding untuk menciptakan suasana yang lebih hidup dan interaktif bagi anak-anak.

### Akses dan Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas

Penyediaan akses dan fasilitas yang setara bagi penyandang disabilitas merupakan tantangan yang diakui oleh perpustakaan. Saat ini, perpustakaan hanya menyediakan koleksi khusus disabilitas, yaitu buku Braille, yang ditempatkan di lantai 1. Namun, akses ke koleksi umum di gedung utama Ungaran belum sepenuhnya mendukung penyandang disabilitas karena masih menggunakan tangga, berbeda dengan cabang Ambarawa yang aksesnya sudah ramah difabel. Meskipun ada upaya untuk membuat jalan khusus kursi roda, desain awal gedung yang bukan untuk perpustakaan menjadi kendala.

Meskipun fasilitas fisik di perpustakaan masih terbatas, upaya pelayanan tetap diutamakan melalui pendekatan langsung dan personal agar penyandang disabilitas memperoleh akses layanan yang setara. Salah satu bentuk implementasinya adalah bantuan personal yang diberikan oleh staf perpustakaan kepada penyandang tunanetra yang ingin mengakses koleksi di lantai atas, meskipun koleksi Braille tersedia di lantai bawah. Pendekatan ini mencerminkan komitmen perpustakaan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dengan mengedepankan empati dan kesetaraan dalam pelayanan. Dengan demikian, penyandang disabilitas tetap dapat merasakan kenyamanan serta mendapatkan pengalaman yang setara dengan pengguna lainnya.

Perpustakaan juga telah menjalin kerja sama dengan kelompok disabilitas, meskipun skalanya belum besar. Salah satu kerja sama yang pernah dilakukan adalah dengan SLB (Sekolah Luar Biasa) di Ungaran, di mana perpustakaan mengadakan pelatihan membaca huruf Braille dengan mengundang pengajar dari Magelang. Untuk membangun kerja sama ini, perpustakaan mengirimkan MoU atau surat kepada pihak terkait dan mempromosikannya melalui media sosial. Peserta pelatihan Braille berasal dari SLB di Kabupaten Semarang dan Ambarawa, serta masyarakat umum yang ingin belajar.

### Keterbatasan Fasilitas Penunjang Program Inklusi Sosial

Pelaksanaan program inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang masih menghadapi berbagai keterbatasan fasilitas. Dari segi fungsionalitas, ruangan praktik masih menyatu dengan ruang baca umum, sehingga memerlukan pengaturan ulang meja dan kursi setiap ada pelatihan. Meskipun perlengkapan dasar tersedia, beberapa pengajar harus membawa alat sendiri, seperti oven listrik, menandakan dukungan fasilitas belum optimal. Dalam aspek kenyamanan, ruang yang digunakan kerap terasa sempit saat peserta membludak, mengganggu konsentrasi dan interaksi. Namun, peserta masih menilai ruangan cukup nyaman jika tidak melebihi kapasitas. Dari sisi keamanan, prosedur mitigasi seperti jalur evakuasi dan APAR telah disiapkan, tetapi akses yang terbatas khususnya di gedung bertingkat tanpa lift belum ramah difabel dan berisiko saat kondisi darurat. Ketahanan fasilitas juga tergolong rendah karena kurangnya perawatan, terutama pada koleksi khusus seperti buku Braille. Konservasi belum dilakukan secara menyeluruh akibat keterbatasan anggaran dan SDM, sehingga koleksi yang rusak sering kali dimusnahkan. Segi fleksibilitas pun masih terbatas karena penataan ruang dilakukan

manual setiap kegiatan, tanpa ruang khusus yang tetap. Ini menyulitkan efisiensi jangka panjang dan mengurangi kenyamanan bagi peserta. Dalam aspek keberlanjutan, perawatan dan pengadaan fasilitas terkendala anggaran yang mengandalkan APBD. Dampaknya terlihat dalam minimnya bahan pelatihan, tertundanya pembangunan ruang baru, serta terbatasnya infrastruktur TIK. Terakhir, dari segi estetika, desain ruang dinilai kuno dan kurang mendukung suasana belajar yang kreatif. Upaya mempercantik ruang hanya dilakukan secara sederhana karena terbatasnya biaya dan birokrasi. Secara keseluruhan, berbagai keterbatasan ini menunjukkan perlunya perencanaan fasilitas yang lebih komprehensif agar program inklusi sosial dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Berikut disajikan Tabel 1. yang menyajikan ringkasan pendapat peserta program inklusi sosial mengenai fasilitas yang terdapat di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang.

Tabel 1. Ringkasan Fungsionalitas dan Kenyamanan Fasilitas Perpustakaan

No.	Konsep	Keterangan
1	Fungsionalitas	Fasilitas sudah berfungsi baik untuk kegiatan inklusi, seperti ruang baca yang dimanfaatkan untuk pelatihan, penyediaan narasumber, alat praktik, publikasi, dan dokumentasi kegiatan.
2	Kenyamanan	Mayoritas peserta merasa nyaman, meskipun ruangan kadang penuh dan berdesakan saat peserta banyak. Ada harapan tersedianya ruang pelatihan khusus agar lebih nyaman.
3	Keamanan	Sudah tersedia jalur evakuasi, rambu evakuasi, APAR, titik kumpul, tetapi masih ada kendala akses difabel karena lokasi di lantai dua dengan tangga yang belum ramah difabel
4	Ketahanan	Fasilitas dijaga kebersihannya, AC dipasang di setiap ruangan, APAR diperiksa masa kadaluarsanya, namun perawatan koleksi khusus (seperti Braille) masih terbatas akibat keterbatasan anggaran.
5	Fleksibilitas	Ruang baca dimodifikasi menjadi ruang pelatihan, meja kursi digeser sesuai kebutuhan kegiatan, jadwal pelatihan juga menyesuaikan ketersediaan peserta dan narasumber.
6	Keberlanjutan	Program dijalankan terus-menerus sejak 2017 dengan dukungan APBD, kegiatan inklusi didampingi hingga peserta mandiri meski ada tantangan keterbatasan anggaran dan sarana.
7	Estetika	Ruang anak diberi warna cerah, ada dekorasi budaya lokal, penataan ruang dibuat tetap menarik meskipun bangunan terkesan kuno, dengan upaya menata pojok baca dan interior agar lebih menyenangkan.

Sumber: Wawancara

### Partisipasi Masyarakat dalam Program Inklusi Sosial

Partisipasi masyarakat dalam program inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari keikutsertaan dalam pelatihan hingga menjadi relawan atau narasumber. Partisipasi ini mencerminkan semangat inklusi, yaitu keterlibatan semua kalangan tanpa memandang latar belakang. Kegiatan seperti pelatihan memasak, kerajinan, menggambar, dan kelas bahasa Inggris membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dan merasa dihargai.

Tak hanya sebagai peserta, sebagian warga juga berkembang menjadi pengajar atau kontributor. Misalnya, peserta pelatihan yang sudah berpengalaman kerap diminta menggantikan pengajar utama saat berhalangan. Masyarakat umum pun sering diundang sebagai narasumber, meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam memberikan kompensasi yang layak. Untuk itu, perpustakaan memberi dukungan dalam bentuk transportasi atau insentif sederhana sebagai bentuk apresiasi. Program ini juga mendapat dukungan kebijakan melalui alokasi anggaran yang telah dirancang dalam struktur keuangan perpustakaan, mencerminkan peran

## **Peran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang dalam mendorong Inklusi Sosial**

strategis lembaga ini dalam pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat memperkuat posisi perpustakaan sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

Lebih jauh, kegiatan dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Perpustakaan tidak hanya menyediakan buku, tetapi juga mengembangkan pelatihan yang relevan, seperti memasak berdasarkan buku resep. Sasaran utamanya adalah masyarakat menengah ke bawah, dengan pendampingan pascapelatihan melalui grup daring, hingga promosi hasil karya untuk mendorong wirausaha. Selain itu, masyarakat turut menyumbang ide dan masukan untuk program mendatang. Aspirasi ini menjadi dasar bagi perpustakaan dalam menyusun kegiatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Fokusnya tidak semata pada penyediaan layanan, tetapi juga pada peningkatan taraf hidup.

Partisipasi masyarakat terbukti memberi dampak nyata. Banyak peserta yang berhasil membuka usaha setelah mengikuti pelatihan, bahkan ada yang kemudian menjadi pengajar. Ini membuktikan bahwa keterlibatan aktif warga dalam program inklusi sosial telah mendorong pemberdayaan dan memperkuat kehidupan sosial di lingkungan mereka.

## **Keterlibatan Komunitas Budaya dan Kerjasama Informal**

Perpustakaan secara aktif melibatkan komunitas budaya dalam berbagai kegiatannya, meskipun sebagian besar kerja sama ini bersifat informal dan belum terikat dalam perjanjian tertulis resmi. Contoh nyata adalah keterlibatan komunitas Permadani Kabupaten Semarang sebagai narasumber dalam pelatihan *pranotocoro*. Komunitas Permadani (Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia) ialah suatu komunitas yang mempunyai misi dalam pelestarian dan pengembangan budaya nasional, terutama budaya Jawa, baik dalam hal bahasa dan seni budaya. Selain itu, perpustakaan juga pernah berkolaborasi dengan komunitas Dewa Siwa untuk pameran batu-batu sejarah dan sanggar tari di Ungaran untuk pelatihan tari. Dewa Siwa merupakan komunitas pecinta situs dan batu candi. Narasumber dari sanggar seni atau pengelola Taman Baca Masyarakat (TBM) juga sering diundang untuk mengisi pelatihan literasi budaya atau menulis. Dalam penyusunan program inklusi sosial, perpustakaan menerapkan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Perpustakaan secara rutin meminta saran atau usulan dari peserta program inklusi sosial dan menyediakan formulir khusus untuk menampung ide-ide kegiatan. Untuk tema program selanjutnya, seringkali diadakan voting di antara peserta untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan pada minggu berikutnya, selama instruktur yang dibutuhkan tersedia. Meskipun penyusunan program secara teknis biasanya dilakukan secara internal oleh tim kerja pelayanan perpustakaan, usulan dari masyarakat dapat diakomodasi dan disesuaikan dengan anggaran serta jadwal perpustakaan. Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, meskipun dengan batasan kapasitas internal.

## **Faktor-faktor Penghambat Partisipasi Peserta Program Inklusi Sosial**

Tingkat partisipasi dalam program inklusi sosial di perpustakaan bervariasi, terutama jika dilihat dari sisi usia dan gender. Kegiatan lebih banyak diminati oleh perempuan, khususnya ibu rumah tangga, karena jenis pelatihan seperti memasak dan kerajinan tangan sesuai dengan minat mereka. Sebaliknya, partisipasi pria masih rendah, umumnya karena keterbatasan waktu dan kurangnya ketertarikan.

Dari segi usia, anak-anak dan lansia cenderung lebih antusias mengikuti kegiatan, sementara kalangan remaja masih minim terlibat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya program yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga perpustakaan berencana mengembangkan pelatihan yang lebih relevan bagi kelompok usia tersebut.

Beberapa faktor lain juga memengaruhi partisipasi, seperti waktu luang, minat terhadap topik, dan cara kegiatan dikemas. Kegiatan yang menarik, seperti mewarnai anak, selalu

mendapat respons positif, sementara kegiatan yang kurang bervariasi seperti kelas bahasa Inggris cenderung diikuti peserta yang sama. Ketertarikan peserta juga dipengaruhi oleh kualitas narasumber, cuaca, dan benturan jadwal kegiatan lainnya.

### **Dampak Inklusi Sosial terhadap Pemberdayaan Masyarakat**

Program inklusi sosial yang dijalankan perpustakaan telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan keterampilan dan kesejahteraan. Sejak 2017, sejumlah peserta berhasil memanfaatkan pelatihan untuk membuka usaha, seperti berjualan kue, rajutan, hingga membangun usaha katering. Bahkan, beberapa dari mereka kini berperan sebagai narasumber dalam pelatihan berikutnya. Keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah peserta, tetapi dari hasil konkret yang dicapai. Perpustakaan secara berkala mengevaluasi dampak pelatihan, termasuk penerapan keterampilan oleh peserta dan sejauh mana pelatihan berkontribusi terhadap peningkatan penghasilan. Jika hasil belum sesuai harapan, perpustakaan akan menelusuri penyebab dan mencari solusi. Penilaian juga mencakup motivasi peserta, keaktifan, dan dampak jangka panjang. Jika kegiatan kurang diminati, perpustakaan membuka ruang masukan dari masyarakat melalui evaluasi sederhana, seperti saran tertulis. Secara keseluruhan, program dinilai sudah berjalan efektif meski belum mencapai potensi maksimal. Bagi peserta, manfaat yang dirasakan meliputi bertambahnya pengetahuan, peningkatan keterampilan usaha, perluasan relasi sosial, dan peluang ekonomi. Ilmu yang diperoleh juga bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan program ini relevan dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

### **Peningkatan Keterampilan dan Potensi Ekonomi**

Dampak utama dari program inklusi sosial adalah peningkatan keterampilan dan potensi ekonomi masyarakat. Perpustakaan berfungsi sebagai fasilitator dan sumber informasi, bukan hanya menyediakan buku tetapi juga secara aktif menggerakkan kegiatan pemberdayaan. Melalui pelatihan keterampilan seperti memasak, membuat kerajinan, menggambar, melukis, dan bahasa Inggris, masyarakat difasilitasi untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh dari koleksi buku perpustakaan.

Dari hasil wawancara dengan penerima manfaat inklusi sosial diperoleh contoh nyata keberhasilan program, antara lain:

1. Peserta yang sebelumnya tidak bisa memasak berhasil menjadi pengusaha kue kering yang sukses.
2. Terdapat peserta yang kini membuka usaha kue atau berjualan tas hasil rajutan sendiri.
3. Beberapa mantan peserta pelatihan bahkan telah menjadi narasumber untuk pelatihan berikutnya karena berhasil mengembangkan usaha katering pribadi.

Transformasi ini menunjukkan bahwa perpustakaan telah berhasil mengubah persepsi masyarakat dari sekadar "gudang buku" menjadi pusat pembelajaran, eksplorasi, dan pengembangan kreativitas yang berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup.

### **Peningkatan Solidaritas Sosial dan Partisipasi**

Program inklusi sosial juga berkontribusi pada peningkatan solidaritas sosial dan partisipasi aktif masyarakat. Perpustakaan mengadopsi pendekatan "jemput bola" dengan mengadakan kegiatan berdasarkan koleksi buku untuk memastikan masyarakat tidak hanya membaca, tetapi juga mempraktikkan pengetahuannya. Proses pendampingan pasca-pelatihan, seperti melalui grup WhatsApp, memungkinkan peserta untuk terus berbagi hasil praktik mereka, menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan kolaboratif.

Meskipun program tidak secara khusus menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah, sasarnya adalah semua kalangan yang ingin meningkatkan kesejahteraan. Faktanya, sebagian besar program memang dirancang untuk masyarakat menengah ke bawah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup. Perpustakaan juga berperan dalam membantu promosi produk peserta dengan mengarahkan mereka untuk memposting hasil karyanya di media sosial atau bahkan membeli produk tersebut untuk keperluan internal. Upaya ini membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan tambahan bagi banyak ibu-ibu. Seluruh inisiatif ini sejalan dengan tujuan inklusi sosial untuk menghapuskan ketidaksetaraan dan diskriminasi, serta menciptakan kesetaraan akses terhadap peluang bagi semua individu.

### Promosi Program Inklusi Sosial melalui TIK dan Media Massa

Perpustakaan Umum Kabupaten Semarang aktif mempromosikan program inklusi sosial melalui berbagai saluran, terutama dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook, dan website dinas menjadi sarana utama promosi karena dianggap lebih efektif dan hemat biaya dibandingkan metode konvensional seperti surat atau radio.

Peran TIK tidak hanya untuk promosi, tetapi juga mendukung komunikasi antar peserta serta antara peserta dan penyelenggara. Desain poster, flyer, hingga tagging pejabat daerah seperti Bupati menjadi bagian dari strategi promosi digital. Selain itu, perpustakaan menyediakan layanan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses koleksi dari rumah.

Gambar 1. Poster Promosi Pelatihan Inklusi Sosial



Sumber: Instagram @perpustakaan\_kabsgm

Namun, pemanfaatan TIK belum optimal karena masih ada kendala, seperti terbatasnya jumlah komputer dan minimnya tenaga IT atau konten kreator untuk mendukung kegiatan digital. Di sisi lain, tidak semua peserta—khususnya ibu rumah tangga—memiliki perangkat yang mendukung atau cukup familiar dengan teknologi. Meski begitu, perpustakaan terus mendorong masyarakat agar lebih melek digital sebagai langkah menuju pelayanan yang lebih modern dan inklusif.

Disajikan Tabel 2 yang menyajikan hambatan internal dan eksternal yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan program inklusi sosial.

Tabel 2. Hambatan Internal dan Eksternal dalam Program Inklusi Sosial

No.	Kategori Hambatan	Deskripsi
1	Internal	<p><b>Keterbatasan Anggaran:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anggaran kegiatan tidak kecil, hanya mengandalkan APBD.</li> <li>Banyak pemangkasan anggaran (efisiensi).</li> <li>Mempengaruhi perawatan fasilitas komprehensif, pengadaan bahan pelatihan, dan infrastruktur TIK.</li> </ul> <p><b>Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya SDM untuk preservasi koleksi.</li> <li>Petugas seringkali harus menangani berbagai tugas (misal: tugas keliling) sehingga jadwal bentrok.</li> <li>Kekurangan kreator konten dan tenaga IT khusus untuk pelatihan digital.</li> </ul> <p><b>Infrastruktur dan Sarana Prasarana Tidak Memadai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gedung lama/kuno, desain awal bukan untuk perpustakaan (gedung kantor).</li> <li>Akses tangga di Ungaran tidak ramah difabel.</li> <li>Tidak ada ruang khusus inklusi, digabung dengan ruang baca umum.</li> <li>Minimnya jumlah komputer untuk pelatihan TIK (target 10 komputer belum terpenuhi).</li> </ul>
2	Eksternal	<p><b>Antusiasme dan Responsivitas Peserta yang Kurang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beberapa kegiatan kurang antusiasme peserta.</li> <li>Peserta kurang responsif atau memiliki kesibukan lain.</li> </ul> <p><b>Ketersediaan Waktu dan Jadwal yang Bentrok:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laki-laki berasalan tidak ada waktu mengikuti pelatihan.</li> <li>Waktu kegiatan bentrok dengan aktivitas lain (misal: sekolah/kuliah, pekerjaan).</li> </ul> <p><b>Faktor Lingkungan (Cuaca):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuaca buruk (hujan) menyebabkan banyak peserta batal datang.</li> </ul> <p><b>Literasi Digital dan Akses TIK Peserta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beberapa peserta (terutama ibu-ibu) tidak memiliki HP atau kesulitan mengoperasikannya.</li> <li>Informasi di grup WA atau Instagram bisa terlewat karena ketidaktahuan/kesulitan akses teknologi.</li> </ul> <p><b>Ketergantungan pada Relasi Eksternal untuk Instruktur:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sedikit orang yang bersedia menjadi pengajar dengan honor minim atau tanpa bayaran, membutuhkan relasi kuat.</li> </ul>

Sumber: Wawancara

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang dalam mendorong inklusi sosial serta dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan "jemput bola", Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang telah mengalami transformasi yang signifikan dari peran tradisionalnya menjadi fasilitator aktif dan sumber informasi utama dalam program inklusi sosial. Proses fasilitasi dilakukan dalam lima tahapan terencana. Pertama, perencanaan dan pelaksanaan

program; kedua, pengembangan dan pengalokasian sumber daya; ketiga, persiapan teknis dan strategi komunikasi; dan keempat, pelaksanaan program. Terakhir, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan adalah bagian dari proses fasilitasi. Perpustakaan tidak hanya membantu peserta mendapatkan pemahaman dari koleksi buku, tetapi juga secara aktif mencari praktisi dan narasumber eksternal untuk pelatihan langsung. Program inklusi sosial diperkuat oleh keterlibatan komunitas budaya lokal seperti Permadani dan Dewa Siwa. Peserta umumnya menganggap fasilitas dasar seperti ruang kegiatan, internet, dan area baca buku braille fungsional dan nyaman. Namun, ada beberapa hambatan, seperti kurangnya 10 unit komputer untuk pelatihan TIK, pengajar kadang-kadang harus membawa peralatan khusus sendiri, dan desain gedung Ungaran yang tidak ramah disabilitas.

Partisipasi masyarakat dalam program inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang rata-rata "cukup aktif" hingga "antusias". Angka kehadiran yang tinggi (sekitar 30 hingga 40 peserta per pelatihan) dan keterlibatan aktif peserta dalam proses belajar menunjukkan indikator partisipasi ini. Faktor-faktor yang mendorong partisipasi termasuk relevansi program dengan kebutuhan nyata masyarakat, strategi "jeput bola", dan taktik promosi yang efektif melalui grup WhatsApp dan Instagram. Meskipun demikian, beberapa masalah yang memengaruhi partisipasi termasuk kurangnya antusiasme beberapa peserta, kendala waktu dan jadwal yang bentrok (terutama bagi laki-laki), faktor cuaca, dan masalah dengan literasi digital dan akses ke TIK bagi sebagian peserta yang menyebabkan informasi terlewati.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang melakukan program inklusi sosial, yang sangat membantu pemberdayaan masyarakat. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan adalah efek utama, yang kemudian digunakan langsung oleh peserta dalam kehidupan sehari-hari. Ini menghasilkan pemberdayaan ekonomi, di mana banyak peserta berhasil memulai usaha mandiri, seperti rajutan, kue kering, dan katering, dengan penghasilan tambahan dan peningkatan kesejahteraan. Karena upaya mereka yang berhasil, beberapa peserta bahkan telah memiliki kesempatan untuk menjadi narasumber. Meskipun demikian, dampak pemberdayaan ini tidak merata ke seluruh peserta; usaha yang dimulai memerlukan dukungan terus-menerus, dan program terbatas pada kelompok yang sangat termarginalkan karena kendala infrastruktur dan literasi digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa perpustakaan daerah memiliki peran strategis sebagai katalisator inklusi sosial yang mengintegrasikan fungsi fasilitasi, partisipasi, dan pemberdayaan berbasis komunitas. Keberhasilan model ini menunjukkan bahwa perpustakaan dapat menjadi motor penggerak pembangunan sosial berbasis literasi, sekaligus ruang pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini juga berpotensi memperkuat model kebijakan transformasi perpustakaan inklusif di tingkat lokal, dengan menempatkan perpustakaan bukan hanya sebagai pusat informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 6. SARAN

Untuk meningkatkan pelayanan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang disarankan melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, melakukan transformasi infrastruktur dengan prioritas pada peningkatan fasilitas yang inklusif dan memadai, seperti penyediaan komputer serta alat pelatihan, dan penyesuaian gedung agar benar-benar aksesibel bagi disabilitas, khususnya di Ungaran. Kedua, memperkuat sumber daya manusia (SDM) melalui alokasi anggaran untuk merekrut tenaga ahli di bidang preservasi, konten digital, dan TI. Penguatan SDM ini penting untuk mengakselerasi digitalisasi seluruh kegiatan inklusi sosial. Ketiga, memperluas jangkauan dan kolaborasi. Perlu dikembangkan program *outreach* yang inovatif untuk

menjangkau kelompok rentan, didukung oleh kolaborasi strategis lintas lembaga dengan Pemda, komunitas budaya, dan sekolah. Untuk menarik mitra kolaborator, dapat ditawarkan sistem insentif yang menarik. Terakhir, bagi masyarakat, diharapkan dapat proaktif memanfaatkan seluruh program dan meningkatkan literasi digital agar dapat mengikuti transformasi ini secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bisri Mustofa, Muhamad, Mezan El-Khaeri Kesuma, Irvia Yunita, Eni Amaliah, and Dwi Indri Rahmawati. "Pemanfaatan Media Pustaka Digital Dalam Membangun Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Di Masa Pandemi." *Jurnal Informasi, Perpustakaan, Dan Kearsipan (JIPKA)* 1, no. 1 (2021): 1–13.
- Brodjonegoro, Prof. Dr. Bambang PS. "Peta Jalan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia." *Kementerian PPN/Bappenas*, 2021, 35. [https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap\\_Bahasa-Indonesia\\_File-Upload.pdf](https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf).
- Faoziyah, Sitti. "Inklusi Sosial Dalam Perspektif Keislaman: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Untuk Semua." *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 5, no. 1 (2023): 47–56. <https://doi.org/10.54783/jin.v5i1.677>.
- Houting, Jacqueline den, Julianne Higgins, Kathy Isaacs, Joanne Mahony, and Elizabeth Pellicano. "From Ivory Tower to Inclusion: Stakeholders' Experiences of Community Engagement in Australian Autism Research." *Frontiers in Psychology* 13, no. August (2022): 1–16. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.876990>.
- Husna, Aftina Nurul, Dwi Yuliani, Titik Rachmawati, Dini Eka Anggraini, Rofi Anwar, and Refo Utomo. "Program Literasi Digital Untuk Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Desa Sedayu, Muntilan, Magelang." *Community Empowerment* 6, no. 2 (2021): 156–66. <https://doi.org/10.31603/ce.4259>.
- Iztihana, Affa, and Mecca Arfa. "Peran Pustakawan MTs N 1 Jepara Dalam Upaya Mengembangkan Minat Kunjungan Siswa Pada Perpustakaan." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 9, no. 1 (2020): 93–103. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/29974>.
- Komariah, Neneng, Encang Saepudin, and Evi Nursanti Rukmana. "Pelayanan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Di Perpustakaan Desa Jendela Dunia Kabupaten Kuningan Jawa Barat." *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 17, no. 1 (2021): 112–27. <https://doi.org/10.22146/bip.v17i1.1298>.
- Kurniasih, RR. Iridayanti, and Rahmat Setiawan Saefullah. "Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan Di Perpustakaan Daerah Karanganyar." *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan* 7, no. 2 (2021): 149–60. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v7i2.34599>.
- Mahdi, Reza. "Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial: Apa Dan Bagaimana Penerapannya? (Sebuah Kajian Literatur)." *Fhris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 15, no. 2 (2020): 201. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2020.152.201-215>.
- Miles, Matthew B.; Huberman, A. Michael. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994.
- Rachman, Rani Auliawati, Dadang Sugiana, and H Rohanda. "Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Untuk Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Untuk Masyarakat Sejahtera ( Studi Pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang )." *Seminar Nasional MACOM III Universitas Padjadjaran 2019 "Communication and Information Beyond Boundaries"* Strategi, no. Februari (2019): 907–18. Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Masyarakat Sejahtera ( Studi Pada

Peran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang dalam mendorong Inklusi Sosial

Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang ).

Retno, Sitaresmi Suryani, Yuli Rohmiyati, and Jazimatul Husna. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perpustakaan: Studi Kasus Di Rumah Pintar ‘Sasana Ngudi Kawruh’ Kelurahan Bandarharjo-Semarang.” *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 4, no. 2 (2015): 157–66. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/9518/0>.

Woro Titi Haryanti. “Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.” *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i2.728>.

